

BAB 3

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2006-2010 telah menunjukkan dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat rata-rata sebesar 16,46 persen pertahun selama tahun 2006-2010 dan terjadinya penghematan dari sisi belanja.

Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; **Pertama**, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. **Kedua**, sumber pembiayaan yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, ***Ketiga***, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri. Dari ketiga sumber pendanaan ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri baik sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2006 – 2010.

3.1.2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program ***intensifikasi*** melalui kegiatan updating database wajib pajak dan retribusi daerah serta ***ekstensifikasi*** melalui penetapan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah (contoh : retribusi pengendalian menara telekomunikasi). Namun dalam penetapannya tidak memberatkan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, pada bulan September 2009 telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang sebelumnya berpedoman pada UU. No 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU. No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009, maka mulai tahun 2011 pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus berpedoman kepada UU No.28 Tahun 2009. Regulasi peraturan perundangan yang ada di pusat tentu juga akan ditindaklanjuti oleh daerah sebagai pelaksana peraturan perundangan tersebut, dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU dimaksud.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Oleh karena itu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Untuk memperkuat struktur APBD dan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, upaya peningkatan penerimaan PAD merupakan keharusan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan yang dimilikinya secara optimal. Terkait dengan

perluasan kewenangan tersebut, pengelolaan sumber-sumber penerimaan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dan akan dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target penerimaan secara lebih rasional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait ditingkat Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
- d. Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- e. Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi disertai peningkatan efektifitas pengawasan disegala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya.
- f. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- g. Melakukan mengadakan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada.

- h. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah, khususnya yang baru disahkan.
- i. Menerbitkan Perda dengan persetujuan DPRD, yang lebih fokus kepada mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada, sehingga ada dasar hukumnya.
- j. Melakukan revisi terhadap Perda-Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- k. Melakukan pengamanan Perda dan penegakan sanksi hukum melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- l. Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/peringatan kepada para Camat yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan.
- m. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
- n. Melakukan kerjasama dengan PLN dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- o. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya.
- p. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya.
- q. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
- r. Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Disamping intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah penggalian sumber-sumber pungutan baru yang belum terjangkau, padahal potensi penerimaannya cukup besar sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan basis pajak secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyusunan peraturan-peraturan baru dan implementasinya untuk menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang potensial. Usaha-usaha ekstensifikasi yang telah dan akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- b. Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjaring wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata.
- c. Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.
- d. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun anggaran 2008-2010 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.

2. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
4. Mengupayakan terbentuknya Pos Pelayanan Pembayaran PKB di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
5. Melakukan penagihan *door to door* kepada masyarakat wajib pajak yang menunggak dengan sistem petugas berkunjung ketempat wajib pajak, khususnya di daerah pelosok.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan khususnya pada sisi pajak dan retribusi daerah selama tahun 2006-2010.

3.1.2.1. Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat

tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah melalui pemungutan pajak.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Bagi Hasil, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Tabel 3.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010 (Rp)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2006	312.621.272.173	410.189.856.467	131,210	-
2007	414.241.725.832	512.735.392.743	123,777	25,00
2008	485.066.411.652	512.606.399.035	105,678	-0,03
2009	552.445.863.000	569.588.359.298	103,103	11,12
2010	602.083.041.000	669.697.289.876	111,230	17,58
GR (%)	17,80	13,038	-4,046	

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Dari sisi Pendapatan Daerah selama tahun 2006-2010 tingkat realisasi rata-rata mencapai 114,8 persen, namun dari sisi pertumbuhan persentase realisasi selama tahun 2006-2010 mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,05 persen dan secara rata-rata realisasi pendapatan daerah selama periode 2006-2010 tumbuh sebesar 13,038 persen.

3.1.2.1.1. *Pendapatan Asli Daerah*

Persentase realisasi Penerimaan PAD selama tahun 2006-2010 rata-rata sebesar 114,28 persen dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 16,46 persen. Pertumbuhan PAD pada tahun 2010 mengalami penurunan dari 13,03 persen tahun 2009 menurun menjadi 3,74 persen tahun 2010, namun nilai PAD meningkat sebesar Rp 719.273.501 dengan persentase realisasi juga meningkat dari 107,19 persen menjadi 111,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan PAD sudah berhasil namun belum optimal dari sisi potensi.

Tabel 3.2.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010 (Rp)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Pert. Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2006	9.503.600.000	10.846.837.475	114,13	
2007	10.910.570.000	13.219.416.707	121,16	21,87
2008	14.494.650.000	17.019.500.848	117,42	28,75
2009	17.945.833.000	19.236.478.967	107,19	13,03
2010	17.897.765.739	19.955.752.468	111,50	3,74
GR (%)	17,15	16,46		

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, Th 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung terwujudnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah, diantaranya melakukan pendaftaran dan pendataan kembali subyek dan obyek pajak, penetapan dan penyuluhan pajak atau retribusi, melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan

penagihan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, pemantauan, evaluasi dan mengkaji ulang terhadap kelayakan tariff pajak dan retribusi dengan kondisi sekarang, serta memberikan teguran terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak.

Secara umum upaya peningkatan PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan yang seringkali menjadi penghambat peningkatan pendapatan daerah. Permasalahan yang teridentifikasi selama tahun 2006-2010 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedia data potensi dan kapasiatas pajak (*tax capacity*) yang valid dan akurat. Masih rendahnya usaha pajak (*tax effort*) yang dilakukan oleh instansi terkait berkenaan dengan upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas yang bisa dipungut pajak (*taxable capacity*).
2. Potensi atau basis PAD terpencar-pencar sesuai dengan letak geografis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mengakibatkan basis-basis yang cukup potensial tetapi lokasinya relatif jauh dari pusat perkantoran pemerintahan tidak tertagih. Hasil pungutannya kurang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan baik berupa biaya perjalanan dinas maupun biaya operasional lainnya, sehingga secara ekonomis kurang efisien.
3. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/retribusi relaitif rendah dan sebagian masyarakat masih berupaya menghindari kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah serta sikap mengelak atas pengenaan pajak (*tax evasion*).
4. Lemahnya system penegakan hukum dan administrasi pendapatan daerah, dimana penerapan sanksi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah belum dilaksanakan sepenuhnya secara tegas.
5. Penegakan hukum dalam memaksa wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya masih relatif rendah (*low enforcement*).

6. Proses pembuatan/pengesahan Perda membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga walaupun ada potensi tetapi Perda-nya belum ada.
7. Terbatasnya jasa pelayanan baik yang disediakan maupun yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi.
8. Belum efektifnya pelaksanaan sosialisasi terhadap Perda-Perda, khususnya yang baru disahkan oleh pihak Legislatif dan besarnya biaya dan lamanya waktu yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat umum.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menemukan solusinya sebagai berikut :

1. Menyediakan data potensi dan kapasiatas pajak (*tax capacity*) yang valid dan akurat. Meningkatkan usaha pajak (*tax effort*) dalam upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas yang bisa dipungut pajak (*taxable capacity*)
2. Membuat *data base* potensi pajak dan retribusi per kecamatan dari data tersebut diketahui kecamatan yang paling potensi sehingga bisa menjadi basis tempat penagihan yang pada gilirannya biaya penagihan dan biaya operasional lainnya dapat lebih efisien.
3. Melakukan pemutakhiran data wajib retribusi serta menelaah data tunggakan pajak dan retribusi, kemudian melaksanakan penagihan PAD perkecamatan secara terjadwal dan terkoordinir.
4. Melaksanakan penyuluhan Perda tentang pajak dan retribusi daerah kepada para wajib pajak dan wajib retribusi per kecamatan dan mengadakan rapat koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan dinas instansi terkait, dalam rangka menerima masukan dan tanggapan serta mnemukan alternative pemecahan permasalahan.
5. Melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait, dan lebih memfungsikan PPNS serta melakukan kerjasama dengan PLN dan Bapera serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam

rangka menindaklanjuti tunggakan-tunggakan berbagai jenis pungutan daerah.

6. Menyelesaikan segera Perda Pajak Daerah (11 jenis pajak) dan retribusi daerah (30 jenis retribusi) sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan secepat mungkin kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun fisik yang harus dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Pengelola PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.1.2.1.2. Dana Perimbangan

Perkembangan dana perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 rata-rata persentase realisasi mencapai 116,49 persen dengan tingkat pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 9,58 persen pertahun. Persentase realisasi dana perimbangan pada tahun 2009 hanya sebesar 98,63 persen, dengan pertumbuhan realisasi hanya sebesar 9,21 persen.

Tabel 3.3.
Perkembangan Dana Perimbangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010 (Rp)

Tahun	Target	Realisasi	persentase Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2006	285.461.007.765	410.242.807.481	143,71	
2007	364.765.110.966	460.031.166.239	126,12	12,14
2008	412.673.916.802	425.221.983.960	103,04	-7,57
2009	470.832.280.000	464.385.153.460	98,63	9,21
2010	533.173.995.413	591.416.852.603	110,92	27,35
GR (%)	16,90	9,58		

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab.Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Ketergantungan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap dana perimbangan pada tahun 2006-2010 masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 87,54 persen. Kontribusi terbesar dana perimbangan pada APBD

terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 95,19 persen dan yang terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 81,53 persen. Sementara itu kontribusi terbesar dari dana perimbangan berasal dari dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dan dan bagi hasil sumberdaya alam.

3.1.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Kontribusi perkembangan lain-lain pendapatan yang sah terhadap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 mengalami fluktuasi yang relatif besar. Demikian juga persentase realisasi cukup fluktuatif dengan persentase tingkat realisasi mencapai rata-rata hanya 24 persen, dan rata-rata pertumbuhan realisasi selama periode 2006-2010 mengalami penurunan sebesar -3,45 persen pertahun.

Tabel 3.4.
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010 (Rp)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Pert. Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2.006	35.313.328.816	9.876.247.352	27,97	
2.007	38.566.044.866	5.611.698.000	14,55	-43,18
2.008	57.897.844.850	8.713.000.000	15,05	55,26
2.009	63.667.750.000	34.745.000.000	54,57	298,77
2.010	102.022.559.696	8.581.107.458	8,41	-75,30
GR (%)	30,37	-3,45	24	

Sumber: Bappeda dan DPKAD KabupatenTanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Sumber penerimaan pos Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari dana hibah dan dana darurat seperti dana penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana pendapatan lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah, yang merupakan penerimaan dari pemerintah pusat sebagai dana penyeimbang dan penyesuaian pada tahun 2006, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 35.313.328.816,- dan realisasinya sebesar Rp

9.876.247.352 atau sekitar 27,97 persen. Pada tahun 2007 target yang ditetapkan untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 38.566.044.866, terealisasi sebesar Rp.5.611.698.000, demikian juga pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 102.022.559.696, realisasinya sebesar Rp. 8.581.107.458.- atau terealisasi hanya sebesar 8,41 persen.

3.1.2.2. Proporsi Sumber Pendapatan

Pada tabel berikut dapat dilihat potret kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 dari sisi pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2006 hanya sebesar 2,52 persen, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2009 mencapai sebesar 3,38 persen, namun pada tahun 2010 kembali turun menjadi 2,98 persen. Penurunan dari kontribusi PAD ini disebabkan oleh penurunan kontribusi dari pendapatan pajak daerah yaitu dari 0,35 persen tahun 2009 menjadi 0,27 persen tahun 2010, demikian juga pendapatan retribusi daerah menurun dari 0,42 persen tahun 2009 menjadi 0,35 persen tahun 2010, lain lain PAD yang sah juga menurun dari 2,17 persen menjadi 1,98 persen. Dari persentase sumber pendapatan daerah tersebut terlihat bahwa PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 sangat tergantung pada pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Jika dibandingkan dari kontribusi pada tahun 2006, pajak daerah sebesar 0,17 persen tahun 2010 meningkat menjadi 0,27 persen, retribusi daerah juga meningkat dari 0,23 persen tahun 2006 meningkat menjadi 0,35 persen tahun 2010, lain-lain PAD yang sah juga meningkat dari 1,93 persen tahun 2006 menjadi 1,98 persen tahun 2010. Dengan demikian secara keseluruhan PAD meningkat baik dalam persentase maupun nilai kumulatif selama periode 2006-2010.

Tabel 3.5.
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010

No	Uraian	Tahun Anggaran					SR (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN (Rp Milyar)	431,9	512,7	512,6	569,6	669,7	
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,52	2,58	3,32	3,38	2,98	2,95
	Pendapatan Pajak Daerah	0,17	0,14	0,22	0,35	0,27	0,23
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,23	0,32	0,44	0,42	0,35	0,35
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,19	0,28	0,33	0,43	0,38	0,32
	Lain-lain PAD yang sah	1,93	1,84	2,34	2,17	1,98	2,05
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	95,19	96,33	94,98	90,52	95,74	94,55
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	95,19	89,72	82,95	81,53	88,31	87,54
	Dana Bagi Hasil Pajak	21,50	19,12	15,44	17,69	15,35	17,82
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26,52	21,15	18,13	16,97	29,81	22,51
	Dana Alokasi Umum	41,63	40,15	41,31	38,40	35,79	39,46
	Dana Alokasi Khusus	5,54	9,30	8,07	8,47	7,36	7,75
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	3,32	8,91	6,66	4,78	4,73
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	0,00	3,32	8,91	6,66	4,78	4,73
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	0,00	3,29	3,12	2,33	2,65	2,28
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	2,02	3,12	2,33	2,65	2,02
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,25
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2,29	1,09	1,70	6,10	1,28	2,49
	Pendapatan Hibah	1,79	0,31	0,43	5,75	1,28	1,91
	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,25
	Pendapatan Lainnya	0,50	0,78	0,00	0,35	0,00	0,33
	TOTAL % PENDAPATAN	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Bappeda dan DPKAD KabupatenTanjung Jabung Timur, Th 2006-2010 (Data diolah)
Ket. SR = Kontribusi Rata-rata (%)

Jika dilihat dari dana pendapatan transfer, kontribusinya sangat tinggi dan relatif konstan yaitu dari 95,19 persen tahun 2006 meningkat sedikit menjadi 95,74 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan ketergantungan sumber pendanaan APBD dari pendapatan transfer sangat tinggi dan secara rata-rata kontribusi pendapatan transfer ini mencapai 94,54 persen selama periode 2006-2010, tingginya ketergantungan sumber pendanaan ini

berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan. Selanjutnya jika dilihat dari dana perimbangan kontribusinya masih relatif tinggi namun cenderung menurun yaitu dari 95,19 persen tahun 2006 menurun menjadi 88,31 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya mencapai 87,54 persen selama tahun 2006-2010. Penurunan kontribusi dana perimbangan ini berasal dari dana bagi hasil pajak yaitu dari 21,50 persen tahun 2006 menurun menjadi 15,35 persen tahun 2010.

Demikian juga Dana Alokasi Umum (DAU) kontribusinya juga menurun dari 41,63 persen tahun 2006 menjadi 35,79 persen tahun 2010. Sedangkan dana bagi hasil sumberdaya alam mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 26,52 persen tahun 2006 meningkat menjadi 29,81 persen tahun 2010 atau kontribusinya rata-rata sebesar 22,51 persen selama periode 2006-2010. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi dari hasil migas yang harganya di pasar Internasional terus meningkat. Dana Alokasi Khusus juga mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 5,54 persen tahun 2006 menjadi 7,36 persen tahun 2010, atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 7,75 persen selama periode 2006-2010. Kontribusi dari transfer Pemerintah Pusat lainnya juga mengalami peningkatan yaitu dari 3,32 persen tahun 2007 meningkat menjadi 4,78 persen tahun 2010, atau secara rata-rata kontribusinya mencapai 4,73 persen selama periode 2006-2010, karena pada tahun 2006 transfer Pemerintah Pusat lainnya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum ada. Transfer Pemerintah Pusat lainnya semua berasal dari dana penyesuaian karena dana otonomi khusus selama periode 2006-2010 untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2006 tidak ada, dan pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 3,29 persen menurun menjadi 2,65 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 2,28 persen pada periode 2007-2010. Dana transfer Pemerintah Provinsi sepenuhnya berasal dari pendapatan bagi hasil pajak, kecuali tahun 2007 ada kontribusi pendapatan bagi hasil lainnya sebesar 1,27 persen. Kontribusi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi meningkat dari 2,02 persen tahun 2007 menjadi 2,65

persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 2,02 persen selama periode 2006-2010. Dengan diberlakukannya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diterapkannya pajak progresif bagi kendaraan bermotor sejak bulan Agustus 2011, maka kedepan kontribusi dari pendapatan bagi hasil pajak diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada khususnya.

Kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami fluktuasi namun cenderung menurun yaitu dari 2,29 persen tahun 2006 menurun menjadi 1,28 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 2,49 persen selama periode 2006-2010. Kontribusi terbesar dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ini berasal dari pendapatan yang kontribusinya juga berfluktuasi namun cenderung menurun yaitu dari 1,79 persen tahun 2006 menurun menjadi 1,28 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 1,91 persen selama periode 2006-2010. Gambaran dari potret kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2006-2010 menunjukkan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembiayaan dari pusat masih relatif tinggi namun trendnya mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu upaya yang kerja keras dari semua pihak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agar terwujud semangat otonomi daerah, dimana sumber pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

3.1.2.3. Realisasi Belanja

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2004 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah menekankan penggunaan anggaran dengan pendekatan Anggaran

Berbasis Kinerja. Melalui pendekatan ini, telah terjadi perubahan struktur belanja daerah yang terdiri atas 2 (dua) kelompok anggaran belanja yaitu Belanja Aparatur Pemerintah dan Belanja Pelayanan Publik. Setiap bagian belanja terdapat 3 (tiga) kelompok belanja yaitu Belanja Administrasi Umum (BAU), belanja operasi dan pemeliharaan (BOP) dan belanja modal (BM).

Pada tahun 2007, telah terjadi perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (*Permendagri*) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan ini juga didasarkan pada pendekatan kinerja, akan tetapi secara prinsip terjadi perubahan mendasar pada konsep pembagiannya. Yaitu, dengan diberlakukannya Peraturan tersebut terjadi perubahan struktur belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu:

- 1) Kelompok belanja tidak langsung, yang terdiri:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - f. Belanja Bagi hasil
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 - h. Belanja Tidak Terduga
- 2) Kelompok belanja langsung, yang terdiri:
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal

Dari gambaran perkembangan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah di atas, untuk melihat perkembangan realisasi belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 2006-2010, dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pengelolaan belanja pada tahun 2006, pengelolaan belanja pada tahun 2007 dan pengelolaan belanja pada tahun 2008-2010. Namun untuk mempermudah pemahaman kita terhadap realisasi belanja tersebut, maka dalam pembahasan ini struktur belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006-2010 terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pertumbuhan belanja tidak langsung selama tahun 2006-2010 mencapai 24,75 persen sedangkan belanja langsung hanya tumbuh sebesar 13,41 persen. Pertumbuhan belanja pegawai mencapai 25,32 persen pada belanja tidak langsung.

Tabel 3.6.
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2006-2010 (Rp)

Uraian Belanja	Tahun Anggaran					GR (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG	97.306.443.768	117.308.480.160	144.463.242.276	195.180.083.657	235.703.631.020	24,75
Belanja Pegawai	80.146.697.104	95.590.907.965	119.427.174.406	166.579.828.842	197.653.054.069	25,32
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
Belanja Subsidi	0	783.602.770	647.055.620	790.625.300	187.596.000	-37,61
Belanja Hibah	0	0	989.065.000	10.671.971.250	19.866.737.831	348,18
Belanja Bantuan Sosial	0	2.979.537.000	7.665.376.850	1.013.808.665	664.008.400	-39,07
Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	16.456.692.664	16.464.442.000	15.734.570.400	15.540.349.600	17.149.879.720	1,04
Belanja Tidak Terduga	703.054.000	1.489.990.425	0	583.500.000	182.355.000	-28,64
BELANJA LANGSUNG	240.204.975.894	327.249.730.926	420.279.750.836	415.751.941.312	397.392.603.606	13,41
Belanja Pegawai	23.333.936.692	21.799.636.464	23.178.016.413	16.719.658.941	18.556.278.812	-5,57
Belanja Barang dan Jasa	53.368.518.603	74.217.792.113	103.563.309.497	108.593.747.745	95.882.176.850	15,77
Belanja Modal	163.502.520.599	231.232.302.349	293.538.424.926	290.438.534.626	282.954.147.944	14,70
TOTAL BELANJA	337.511.419.662	444.558.211.086	564.742.993.112	610.932.024.969	633.096.234.625	17,03

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Berdasarkan realisasi tersebut, tergambar pertumbuhan belanja tidak langsung mendekati dua kali lipat pertumbuhan rata-rata belanja langsung. Oleh karena itu agar belanja pembangunan dapat terus ditingkatkan, maka perlu komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membuat peraturan daerah porsi yang pantas untuk dialokasikan kepada belanja langsung.

Kontribusi belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan dalam realisasi belanja dari 28,83 persen tahun 2006 meningkat menjadi 37,23 persen tahun 2010 atau rata-rata sebesar 30,00 persen selama periode 2006-2010. Peningkatan ini didorong oleh kontribusi belanja pegawai dari 23,75 persen tahun 2006 meningkat menjadi 31,22 persen tahun 2010 atau secara rata-rata belanja pegawai selama kurun waktu 2006-2010 mencapai 24,98 persen. Belanja subsidi meningkat dari 0,18 persen tahun 2007 menurun menjadi 0,03 persen tahun 2010 atau secara rata-rata yang dialokasikan untuk belanja subsidi selama tahun 2006-2010 hanya sebesar 0,09 persen. Belanja hibah meningkat dari 0,18 persen tahun 2008 menjadi 3,14 persen tahun 2010, atau secara rata-rata selama periode 2006-2010 sebesar 1,01 persen. Belanja bantuan sosial relatif berfluktuasi yaitu dari 0,67 persen tahun 2007 meningkat menjadi 1,36 persen tahun 2008, kemudian turun lagi menjadi 0,10 persen tahun 2010. Demikian juga belanja bantuan keuangan kepada pemerintah yang lebih rendah seperti pemerintah desa mengalami fluktuasi, namun relatif menurun dari 4,88 persen tahun 2006 menjadi 2,71 persen tahun 2010. Penurunan kontribusi bantuan keuangan ini menunjukkan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendorong pembangunan di pedesaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum maksimal dari sisi pendanaan. Namun pada tahun 2011 kontribusi bantuan ini meningkat menjadi 4,2%.

Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010

Uraian Belanja	Tahun Anggaran					SR (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG	28,83	26,39	25,58	31,95	37,23	30,00
Belanja Pegawai	23,75	21,50	21,15	27,27	31,22	24,98
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,18	0,11	0,13	0,03	0,09
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,18	1,75	3,14	1,01
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,67	1,36	0,17	0,10	0,46
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	4,88	3,70	2,79	2,54	2,71	3,32
Belanja Tidak Terduga	0,21	0,34	0,00	0,10	0,03	0,13
BELANJA LANGSUNG	71,17	73,61	74,42	68,05	62,77	70,00
Belanja Pegawai	6,91	4,90	4,10	2,74	2,93	4,32
Belanja Barang dan Jasa	15,81	16,69	18,34	17,78	15,14	16,75
Belanja Modal	48,44	52,01	51,98	47,54	44,69	48,93
TOTAL BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. SR = Kontribusi Rata-rata (%)

Dari sisi realisasi belanja langsung, kontribusinya dalam realisasi belanja total mengalami fluktuasi namun cenderung menurun yaitu dari 71,17 persen tahun 2006, meningkat menjadi 73,61 persen tahun 2007, kemudian meningkat lagi menjadi 74,42 persen tahun 2008, namun kembali turun menjadi 68,05 persen tahun 2009 dan kembali turun lagi menjadi 62,77 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusi belanja langsung sebesar 70,00 persen selama periode 2006-2010. Penurunan belanja langsung ini terutama didorong oleh penurunan belanja modal yang juga berfluktuasi namun cenderung menurun yaitu dari 48,44 persen tahun 2006 meningkat menjadi 52,01 persen tahun 2008, turun lagi menjadi 51,98 persen tahun 2008 kemudian turun menjadi 47,54 persen tahun 2009 dan turun lagi menjadi 44,69 persen tahun 2010 atau secara rata-rata kontribusinya sebesar 48,93 persen selama periode 2006-2010. Demikian juga untuk belanja

barang dan jasa relatif berfluktuasi namun cenderung menurun yaitu dari 15,81 persen tahun 2006 menjadi 15,14 persen tahun 2010. Sedangkan untuk belanja pegawai dari belanja langsung sangat berfluktuasi, berdasarkan data yang ada, kontribusi belanja pegawai pada tahun 2006 sebesar 6,91 persen dan tahun 2007 turun menjadi 4,90 persen, dan terus menurun sehingga pada tahun 2010 belanja pegawai untuk belanja langsung hanya tinggal 2,93 persen atau secara rata-rata belanja pegawai pada belanja langsung selama periode 2006-2010 sebesar 4,32 persen. Bila dijumlahkan belanja pegawai dari belanja tidak langsung dengan belanja langsung, maka belanja pegawai mengalami peningkatan yaitu dari 30,66 persen tahun 2006 meningkat menjadi 34,15 persen tahun 2010 atau secara rata-rata selama tahun 2006-2010 mencapai 29,29 persen. Hal ini menunjukkan dari sisi realisasi belanja, komponen dari belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung relatif besar. Oleh karena itu kinerja APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 dari sisi realisasi belanja belum menunjukkan fokus pemerintah terhadap peningkatan pelayanan dasar dan daya saing daerah sesuai dengan UU No.32 tahun 2004.

3.1.3. Neraca Keuangan

Perkembangan aset lancar dalam neraca keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2006-2010 mengalami fluktuasi yang cukup besar, dimana pada tahun 2007 meningkat sebesar 39,37 persen, kemudian tahun 2008 menurun sebesar -22,15 persen, tahun 2009 menurun lagi sebesar -21,76 persen namun pada tahun 2010 meningkat relatif tajam yaitu sebesar 23,47 persen. Dengan demikian aset lancar selama tahun 2006-2010 mengalami peningkatan rata-rata hanya sebesar 1,18 persen, dimana pada tahun 2006 jumlah aset lancar mencapai Rp 171.747.197.022 kemudian pada 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp 180.011.377.743.

Peningkatan asset lancar ini salah satu disebabkan oleh meningkatnya kas dari Rp 168.264.647.158 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 172.290.995.364 atau meningkat rata-rata sebesar 0,59 persen pertahun. Demikian juga dengan piutang dari Rp 983.208.159 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 3.958.509.959 pada tahun 2010, sedangkan untuk Investasi jangka pendek tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2006-2010. Investasi ini biasa diarahkan pada deposito jangka pendek maksimal 3 bulan, dengan memanfaatkan dana yang masih menganggur yang biasanya ditempatkan di Bank milik daerah atau Bank nasional yang ada di daerah. Sedangkan untuk piutang lain-lain mengalami penurunan dari Rp 1.300.000.000 tahun 2006 menurun menjadi Rp 31.650.000 tahun 2010 atau turun rata-rata sebesar 60,50 persen pertahun. Namun untuk persediaan mengalami peningkatan selama tahun 2006-2010 yaitu dari Rp 1.199.341.705 tahun 2006 meningkat menjadi Rp 3.730.222.420 tahun 2010 atau meningkat rata-rata sebesar 32,80 persen pertahun.

Investasi jangka panjang menurun rata-rata sebesar -6,78 persen, penurunan investasi ini didorong oleh investasi permanen turun rata-rata sebesar -7,78 persen, sedangkan investasi non permanen meningkat rata-rata selama periode 2008-2010 sebesar 22,47 persen. Investasi ini ditempatkan di beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinilai mempunyai prospek yang baik.

Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 55,22 persen, tahun 2008 sebesar 46,03 persen, tahun 2009 sebesar 31,44 persen dan tahun 2010 sebesar 22,45 persen, sehingga secara rata-rata aset tetap tumbuh sebesar 38,20 persen selama tahun 2006-2010. Total aset tetap Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2006 sebesar Rp 418.761.487.940 meningkat menjadi Rp 1.527.733.592.719 pada tahun 2010. Kontribusi terbesar dari aset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar Rp 241.826.384.227

atau 57,75 persen kontribusinya pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 805.439.608.106 atau 52,72 persen pada tahun 2010. Kontribusi terbesar kedua adalah gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp 90.825.361.520 atau 21,69 persen pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi Rp 321.151.850.059 tahun 2010 atau 21,02 persen tahun 2010. Penurunan kontribusi dari gedung dan bangunan ini, karena kontribusi dari aset tetap seperti tanah dan konstruksi dalam pengejerjaan meningkat atau tumbuh lebih besar dari aset tetap gedung dan bangunan, disamping itu gedung dan bangunan ini nilainya juga mengalami penyusutan. Demikian juga untuk peralatan dan mesin dimana pada tahun 2006 kontribusinya sebesar 13,26 persen menurun menjadi 12,76 persen pada tahun 2010. Walaupun kontribusi dari peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan menurun namun nilainya nominalnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 36,87 persen dan 37,13 persen selama tahun 2006-2010.

Tabel 3.8.
Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	GR(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas	168.264.647.158	232.513.113.462	179.331.706.771	138.345.721.593	172.290.995.364	0,59
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	
1.1.3	Piutang	983.208.159	40.090.222	33.735.000	3.503.734.154	3.958.509.959	41,65
1.1.4	Piutang Lain-lain	1.300.000.000	4.130.257.435	3.914.652.053	93.481.016	31.650.000	-60,50
1.1.5	Persediaan	1.199.341.705	2.675.448.815	3.055.192.702	3.852.548.141	3.730.222.420	32,80
	JUMLAH ASET LANCAR	171.747.197.022	239.358.909.934	186.335.286.526	145.795.484.904	180.011.377.743	1,18
	PERT.ASET LANCAR (%)		39,37	-22,15	-21,76	23,47	
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Non Permanen	0	0	300.000.000	450.000.000	450.000.000	22,47
1.2.2	Investasi Permanen	14.013.000.000	7.633.000.000	8.633.000.000	8.133.000.000	10.133.000.000	-7,78
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	14.013.000.000	7.633.000.000	8.933.000.000	8.583.000.000	10.583.000.000	-6,78
	PERT. INVESTASI J PANJANG (%)		-45,53	17,03	-3,92	23,30	
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	8.169.130.375,00	9.657.857.495	11.886.018.255	12.727.458.721	13.965.993.881	14,35
1.3.2	Peralatan dan Mesin	55.527.864.637,77	87.285.621.238	134.323.827.890	159.643.392.348	194.894.017.517	36,87
1.3.3	Gedung dan Bangunan	90.825.361.520,00	156.572.422.122	234.238.544.116	282.399.518.230	321.151.850.059	37,13
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	241.826.384.227,00	366.869.777.879,	521.042.569.811	674.176.704.281	805.439.608.106	35,09
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	8.316.365.552,67	16.162.207.252	28.140.127.753	40.839.742.378	45.005.293.078	52,52
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.096.381.628,00	13.445.904.302	19.554.888.591	77.854.621.200	147.276.830.078	79,79
	JUMLAH ASET TETAP	418.761.487.940	649.993.790.289	949.185.976.415	1.247.641.437.157	1.527.733.592.719	38,20
	PERT. ASET TETAP (%)		55,22	46,03	31,44	22,45	
1.4	ASET LAINNYA						
1.4.1	Aset lain-lain	300.000.000	1.600.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.050.000.000	36,78
	JUMLAH ASET LAINNYA	300.000.000	1.600.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.050.000.000	36,78
	TOTAL ASET	604.821.684.962	898.585.700.224	1.145.604.262.942	1.683.262.077.622	191.644.377.782	-24,97
	PERTUMBUHAN TOTAL ASET (%)		48,57	27,49	46,93	-88,61	

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Lanjutan Neraca Aset

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	168.264.647.158	232.441.866.560	179.305.273.384	138.309.497.313	172.289.229.364	0,59
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	71.246.902	6.433.387	9.780.280	235.500	-84,82
Cadangan Piutang	2.283.208.159	4.170.347.657	3.948.387.053	3.597.215.170	3.990.159.959	14,98
Cadangan Persediaan	1.199.341.705	2.675.448.815	3.055.192.702	3.852.548.141	3.730.222.420	32,80
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(2.185.852.392)	-	0	0	0	- 100,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	169.561.344.630	239.358.909.934	186.315.286.526	145.769.040.904	180.009.847.243	1,51
EKUITAS DANA INVESTASI						
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	14.013.000.000	7.633.000.000	8.933.000.000	8.583.000.000	10.583.000.000	-6,78
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	418.761.487.940	649.993.790.289	949.185.976.415	1.247.641.437.157	1.527.733.592.719	38,20
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	300.000.000	1.600.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.050.000.000	36,78
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	433.074.487.940	659.226.790.289	959.268.976.415	1.257.374.437.157	1.539.366.592.719	37,31
JUMLAH EKUITAS DANA	602.635.832.570	898.585.700.224	1.145.584.262.942	1.403.143.478.061	1.719.376.439.962	29,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	604.821.684.962,46	898.585.700.223,60	1.145.604.262.942	1.403.169.922.061	1.719.377.970.462	29,85

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab.Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah) Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Hutang jangka pendek dalam neraca keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan dari Rp 2.185.852.392 tahun 2006 menurun menjadi Rp 1.530.500 atau menurun rata-rata sebesar -83,73 persen pertahun selama 2006-2010. Munculnya hutang jangka pendek ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kewajiban jangka pendek yaitu dari Rp 2.185.852.392 tahun 2006 menurun menjadi Rp 1.530.500 tahun 2010, sehingga kewajiban hutang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan akan terus menurun hingga tahun 2011. Hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek pada tahun 2006 disebabkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mempunyai Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp 2.185.852.392, namun pada tahun 2007 sudah tidak ada kemudian tahun 2008 muncul lagi sebesar Rp 20.000.000, tetapi tahun 2009-2010 Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tidak ada lagi sehingga secara total kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya berasal dari hutang jangka pendek lainnya. Sedangkan hutang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada, sehingga kewajiban jangka panjang sampai tahun 2010 tidak ada. Dengan demikian dari perhitungan kewajiban jangka pendek tersebut sama jumlahnya dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu menurun sebesar 100 persen pada tahun 2007, kemudian tumbuh 100 persen lagi pada tahun 2008 dan meningkat sebesar 32,22 persen pada tahun 2009 dan menurun sebesar 94,21 persen tahun 2010, sehingga secara rata-rata total kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun rata-rata sebesar -83,73 persen pertahun selama 2006-2010.

Tabel 3.9.
Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	GR (%)
1	2	3	4	5	6	7	
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.185.852.392	0	20.000.000	0	8.878.585	-74,75
2.1.2	Utang Bunga	0	0	0	0		
2.1.3	Utang Pajak	0	0	0	0		
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0		
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0		
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	26.444.000	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.185.852.392	0	20.000.000	26.444.000	8.878.585	-74,75
	PERT. KEWAJIBAN JK PENDEK (%)		-100,00	100,00	32,22	-66,42	
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0		
2.2.2	Utang Luar Negeri	0	0	0	0		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0		
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.185.852.392	0	20.000.000	26.444.000	8.878.585	-74,75
	PERT. KEWAJIBAN JK.PANJANG (%)		-100,00	100,00	32,22	-66,42	

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab.Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 tumbuh rata-rata sebesar 29,97 persen pertahun, dimana pada tahun 2007 tumbuh sebesar 49,11 persen, tahun 2008 sebesar 27,49 persen, tahun 2009 sebesar 22,48 persen dan tahun 2010 sebesar 22,54 persen. Sumber pertumbuhan ini berasal dari ekuitas dana investasi tahun 2007 sebesar 52,22 persen, tahun 2008 sebesar 45,51 persen, tahun 2009 sebesar 31,08 persen dan tahun 2010 sebesar 22,43 persen, sehingga secara rata-rata ekuitas dana investasi tumbuh sebesar 37,31 persen pertahun selama 2006-2010. Sedangkan untuk ekuitas dana lancar pada tahun 2007 tumbuh sebesar 41,16 persen, kemudian tahun 2008 dan 2009 masing-masing menurun sebesar -22,16 persen dan -21,76 persen, namun pada tahun 2010 kembali tumbuh sebesar 23,49 persen, sehingga secara rata-rata ekuitas dana lancar hanya tumbuh sebesar 1,51 persen. Rendahnya pertumbuhan ekuitas dana lancar ini disebabkan Silpa hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,59 persen dan pendapatan yang ditanggihkan menurun rata-rata sebesar -84,82 persen pertahun selama periode 2006-2010. Ekuitas dana lancar diperoleh dari jumlah Silpa ditambah cadangan untuk piutang dan cadangan untuk persediaan dikurangi utang jangka pendek ditambah pendapatan yang ditanggihkan, sehingga tahun 2006 jumlah ekuitas dana lancar mencapai Rp 169.561.344.630 dan tahun 2010 sebesar Rp 180.009.847.243. Sedangkan pertumbuhan ekuitas dana investasi didorong oleh investasi dalam jangka panjang, investasi dalam asset tetap dan investasi dalam asset lain masing tumbuh rata-rata sebesar 50,34 persen, 38,20 persen dan 36,78 persen pertahun selama periode 2006-2010.

Selanjutnya untuk ekuitas dana cadangan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 tidak ada, karena tidak ada investasi dalam bentuk dana cadangan. Dengan demikian secara total jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2006 mencapai Rp 604.821.684.963 dan tahun 2010 sebesar Rp 1.719.377.970.462 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 29,85 persen pertahun selama 2006-2010. Pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2007 sebesar 48,57 persen, tahun 2008 sebesar 27,49

persen, tahun 2009 sebesar 22,48 persen dan tahun 2010 sebesar 22,54 persen.

Tabel 3.10
Neraca Keuangan Ekuitas Dana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Per 1 Januari 2006 - 31 Desember 2010

Kode Rek	URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	GR (%)
1	2	3	4	5	6		7
3	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	168.264.647.158	232.441.866.560	179.305.273.384	138.309.497.313	172.183.181.816	0,59
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	2.283.208.159	4.170.347.657	3.948.387.053	3.597.215.170	4.232.427.913	16,68
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	1.199.341.705	2.675.448.815	3.055.192.702	3.852.548.141	4.321.700.476	37,78
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(2.185.852.392)	-	0	0	0	-100,00
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	-	71.246.902	6.433.387	9.780.280	1.235.500	-73,76
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	169.561.344.630	239.358.909.934	186.315.286.526	145.769.040.904	180.738.545.705	1,61
	PERT. EKUITAS DANA LANCAR (%)		41,16	-22,16	-21,76	23,99	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1	Diinvestasikan dlm Investasi Jk.Panjang	33,187,500,000	51,921,964,500	77,352,189,484	114,179,088,567	10.583.000.000	-24,85
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	418.761.487.940	649.993.790.289	949.185.976.415	1.247.641.437.157	1.515.488.669.619	37,93
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	300.000.000	1.600.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	12.718.125.592	155,17
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	14.013.000.000	7.633.000.000	8.933.000.000	8.583.000.000	10.583.000.000	-6,78
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	433.074.487.940	659.226.790.289	959.268.976.415	1.257.374.437.157	1.538.789.798.311	37,29
	PERT.EKUITAS DANA INVESTASI (%)		52,22	45,51	31,08	22,38	
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN						
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0	0	0	0		
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	0	0		
	JUMLAH EKUITAS DANA	602.635.832.570	898.585.700.224	1.145.584.262.942	1.403.143.478.061	1.719.528.340.915	29,97
	PERT. EKUITAS DANA (%)		49,11	27,49	22,48	22,55	
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	604.821.684.963	898.585.700.224	1.145.604.262.942	1.403.169.922.061	1.719.537.219.501	29,85
	PERT. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (%)		48,57	27,49	22,48	22,55	

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab.Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

3.1.3.1. Rasio Likuiditas Neraca Keuangan

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
Rasio Likuiditas					
a. Rasio Lancar	10,6024	31,3584	20,8126	16,9344	16,9952
b. Quick Ratio	10,5284	31,0079	20,4714	16,4869	16,6430

Sumber: Hasil Pengolahan (2011)

3.1.3.1.1. Rasio Lancar (*Current ratio*)

Rasio Lancar (*Current ratio*), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan

perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2006 sebesar 10,6024, tahun 2007 nilai rasio lancar sebesar 31,3584, tahun 2008 sebesar 20,8126, tahun 2009 sebesar 16,9344 dan tahun 2010 sebesar 16,9952. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Jika dilihat dari trend nilai rasio lancar tersebut cenderung terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi rasio lancar (*current ratio*) sangat baik dan sangat sehat. Oleh karena itu kedepan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harus tetap mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan asset lancarnya terutama terkait dengan kewajiban jangka pendek.

3.1.3.1.2. *Quick Ratio*

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka *quick ratio* yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya *quick ratio* yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2006 sebesar 10,5284, tahun 2007 *quick ratio*nya sebesar 31,0079, tahun 2008 sebesar 20,4714, tahun 2009 sebesar 16,4869 dan tahun 2010 sebesar 16,6430. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, dengan nilai dari *quick ratio* menunjukkan trend

yang terus meningkat, sehingga kedepan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan pengelolaan asset lancar.

3.1.3.2. Rasio Solvabilitas

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio solvabilitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2006-2010 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12.
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	
Rasio Solvabilitas					
a. Rasio Kewajiban Terhadap Asset	0,026783	0,008494	0,007815	0,005115	0,055268
b. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,026880	0,008494	0,007815	0,006136	0,006160

Sumber: Hasil Pengolahan (2011).

3.1.3.2.1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset

Rasio ini secara langsung membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 0,026783, tahun 2007 sebesar 0,008494, tahun 2008 sebesar 0,007815, tahun 2009 sebesar 0,005115 dan tahun 2010 sebesar 0,0055268. Dilihat dari nilai trend rasio kewajiban terhadap aset, nilainya relatif kecil namun cenderung meningkat. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap aset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak

kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pinjaman ke kreditor.

3.1.3.2.2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas

Rasio ini secara langsung membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 0,026880, tahun 2007 sebesar 0,008494, tahun 2008 sebesar 0,007815, tahun 2009 sebesar 0,006136 dan tahun 2010 sebesar 0,006160. Nilai rasio ini hampir sama dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas (lihat tabel 3.12). Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pinjaman ke kreditor.

3.1.3.3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang

adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Rasio Aktivitas Neraca Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	
Rasio Aktivitas					
1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang	75,222	57,395	47,193	40,530	45,114
2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan	2,549	4,080	5,985	9,645	7,564

Sumber: Hasil Pengolahan (2011).

3.1.3.3.1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang

Rasio tersebut menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 75,222, tahun 2007 sebesar 57,395, tahun 2008 sebesar 47,193, tahun 2009 sebesar 40,530 dan tahun 2010 sebesar 45,114. Jika dilihat dari hasil rasio tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 relatif berfluktuasi, namun cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang relatif pendek dalam proses sampai dengan pembayaran tunai, sehingga dapat memperlancar arus kas di Neraca Keuangannya.

3.1.3.3.2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan

Rasio tersebut menunjukkan berapa lama umur rata-rata persediaan atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan penggunaan persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2006 sebesar 2,549, tahun 2007 sebesar 4,080, tahun 2008 sebesar 5,985, tahun 2009 sebesar 9,645 dan tahun 2010 sebesar 7,564. Nilai Rasio rata-rata umur persediaan 7,564 artinya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2010 memiliki jumlah perputaran persediaan sebesar 7,564 kali dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relative rendah dan dapat mengganggu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relative besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah

dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel berikut dapat dilihat proporsi belanja anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2006-2010.

Untuk belanja daerah alokasi dana yang tersedia untuk 2006 adalah sebesar Rp 337,51 milyar meningkat menjadi Rp 444,56 milyar tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi Rp 564,74 milyar pada tahun 2008, kemudian naik lagi menjadi 610,93 milyar tahun 2009 dan pada tahun 2010 naik menjadi Rp 633,096 milyar atau secara rata-rata total belanja meningkat sebesar 17,03 persen pertahun selama periode 2006-2010. Total belanja tidak langsung pada tahun 2006 sebesar 97,31 milyar, pada tahun 2007 sebesar Rp 117,31 milyar dan pada tahun 2007 naik lagi menjadi Rp 235,70 milyar atau secara rata-rata meningkat sebesar 24,75 persen pertahun. Adapun untuk belanja langsung untuk tahun 2006 sebesar Rp 240,20 milyar pada tahun 2007 sebesar Rp 327,25 milyar dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi Rp 397,39 milyar atau meningkat rata-rata sebesar 13,41 persen pertahun. Jika dilihat dari proporsinya, maka anggaran belanja tidak langsung meningkat dari 28,83 persen tahun 2006 menjadi 37,23 persen tahun 2010 atau sharenya rata-rata sebesar 30,0 persen selama periode 2006-2010. Peningkatan belanja tidak langsung ini didorong oleh belanja pegawai dari 23,75 persen tahun 2006 menjadi 31,22 persen tahun 2010 atau rata-rata sebesar 24,98 persen selama tahun 2006-2010.

Belanja subsidi menurun dari 0,18 persen tahun 2007 menjadi 0,03 persen tahun 2010 atau secara rata-rata yang dialokasikan untuk belanja subsidi selama tahun 2006-2010 hanya sebesar 0,09 persen. Belanja hibah meningkat dari 0,18 persen tahun 2008 menjadi 3,14 persen tahun 2010, atau secara rata-rata selama periode 2006-2010 sebesar 1,01 persen. Belanja bantuan sosial relatif berfluktuasi yaitu dari 0,67 persen tahun 2007 meningkat menjadi 1,36 persen tahun 2008, kemudian turun lagi menjadi 0,10 persen tahun 2010 atau rata-rata hanya sebesar 0,46 persen. Demikian juga belanja bantuan keuangan kepada pemerintah yang lebih rendah seperti

pemerintah desa mengalami fluktuasi, namun relatif menurun dari 4,88 persen tahun 2006 menjadi 2,71 persen tahun 2010. Rendahnya kontribusi bantuan keuangan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendorong pembangunan di pedesaan belum maksimal dari sisi pendanaan.

Tabel 3.14.

**Perkembangan dan Proporsi Belanja Anggaran
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2006-2010 (Rp dan %)**

Uraian Belanja	Tahun Anggaran					GR& SR (%)
	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
I. BELANJA TDK LANGSUNG	97.306.443.768	117.308.480.160	144.463.242.276	195.180.083.657	235.703.631.020	24,75
Kontribusi (%) dan SR (%)	28,83	26,39	25,58	31,95	37,23	30,00
1. Belanja Pegawai	80.146.697.104	95.590.907.965	119.427.174.406	166.579.828.842	197.653.054.069	25,32
Kontribusi (%) dan SR (%)	23,75	21,50	21,15	27,27	31,22	24,98
2. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
Kontribusi (%) dan SR (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Belanja Subsidi	0	783.602.770	647.055.620	790.625.300	187.596.000	-37,61
Kontribusi (%) dan SR (%)	0,00	0,18	0,11	0,13	0,03	0,09
4. Belanja Hibah	0	0	989.065.000	10.671.971.250	19.866.737.831	348,18
Kontribusi (%) dan SR (%)	0,00	0,00	0,18	1,75	3,14	1,01
5. Belanja Bantuan Sosial	0	2.979.537.000	7.665.376.850	1.013.808.665	664.008.400	-39,07
Kontribusi (%) dan SR (%)	0,00	0,67	1,36	0,17	0,10	0,46
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0,00
Kontribusi (%) dan SR (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	16.456.692.664	16.464.442.000	15.734.570.400	15.540.349.600	17.149.879.720	1,04
Kontribusi (%) dan SR (%)	4,88	3,70	2,79	2,54	2,71	3,32
8. Belanja Tidak Terduga	703.054.000	1.489.990.425	0	583.500.000	182.355.000	-28,64
Kontribusi (%) dan SR (%)	0,21	0,34	0,00	0,10	0,03	0,13
II. BELANJA LANGSUNG	240.204.975.894	327.249.730.926	420.279.750.836	415.751.941.312	397.392.603.606	13,41
Kontribusi (%) dan SR (%)	71,17	73,61	74,42	68,05	62,77	70,00
1. Belanja Pegawai	23.333.936.692	21.799.636.464	23.178.016.413	16.719.658.941	18.556.278.812	-5,57
Kontribusi (%) dan SR (%)	6,91	4,90	4,10	2,74	2,93	4,32
2. Belanja Barang dan Jasa	53.368.518.603	74.217.792.113	103.563.309.497	108.593.747.745	95.882.176.850	15,77
Kontribusi (%) dan SR (%)	15,81	16,69	18,34	17,78	15,14	16,75
3. Belanja Modal	163.502.520.599	231.232.302.349	293.538.424.926	290.438.534.626	282.954.147.944	14,70
Kontribusi (%) dan SR (%)	48,44	52,01	51,98	47,54	44,69	48,93
TOTAL BELANJA (Rp)	337.511.419.662	444.558.211.086	564.742.993.112	610.932.024.969	633.096.234.625	17,03
TOTAL BELANJA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)

Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

SR = Kontribusi rata-rata (%)

Disisi lain belanja langsung sharenya menurun dari 71,17 persen tahun 2006 menjadi 62,77 persen tahun 2010, penurunan ini disebabkan belanja modal juga menurun dari 48,44 persen tahun 2006 menjadi 44,69 persen tahun 2010. Demikian juga untuk belanja barang dan jasa sedikit menurun masing-masing dari 15,81 persen tahun 2006 menjadi 15,14 persen tahun 2010. Dari proporsi belanja ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran selama tahun 2006-2010 trend menunjukkan bahwa belanja pegawai cenderung meningkat dari pada belanja modal dan data menunjukkan rasio tahun 2010 sudah mendekati antara belanja aparatur dengan belanja modal yaitu 34,15 untuk total belanja pegawai dan 44,69 persen untuk belanja modal. Kondisi ini kedepan harus dikoreksi, agar proporsi belanja menjadi lebih fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Kondisi alokasi anggaran ini mengindikasikan bahwa, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2006-2010 belum memprioritaskan alokasi anggaran pada belanja publik yaitu untuk menstimulasi ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang rusak.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada tahun 2006 – 2007 terjadi surplus anggaran dan pada tahun 2008-2009 terjadi defisit anggaran, kemudian tahun 2010 anggaran kembali surplus. Defisit anggaran tahun 2008 sebesar Rp 52,137

milyar dipenuhi dari Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp 232,442 milyar. Sumber penerimaan pembangunan selama tahun 2006-2010 sebagian besar berasal dari Silpa tahun lalu, hanya tahun 2009 penerimaan pembangunannya ada yang berasal hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 500 juta. Pada tahun 2009 penerimaan pembangunan sebesar Rp 179,805 milyar dimana sebesar Rp 179,305 milyar berasal Silpa tahun lalu Rp 0,5 milyar berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan pembangunan tumbuh rata-rata sebesar 16,13 persen dan Silpa tahun lalu tumbuh rata-rata sebesar 16,10 persen pertahun selama periode 2006-2010.

Tabel 3.15.
Perkembangan Pembiayaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2006-2010 (Rp Jutaan)

NO	PEMBIAYAAN	2006		2007		2008		2009		2010	
		Angg	Realisasi	Angg	Realisasi	Angg	Realisasi	Angg	Realisasi	Angg	Realisasi
	SURPLUS / (DEFISIT)	-70.810	93.454	-120.334	68.177	-245.401	-52.137	-174.686	-41.346	-134.809	36.269
3	PEMBIAYAAN										
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.110	76.110	167.869	165.265	232.442	232.442	178.436	179.805	138.309	138.409
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)	76.110	76.110	167.869	165.265	232.442	232.442	178.436	179.305	138.309	138.309
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0	0	0	500	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.300	1.300	2.450	1.000	2.850	1.000	3.750	150	35.000	2.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.300	1.300	2.450	1.000	2.850	1.000	3.750	150	35.000	2.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengembalian Pendapatan Tahun Anggaran Sebelumnya		0	0	0	0	0	0	0	0	389
4.	Pembiayaan Neto	70.810	74.810	165.419	164.265	229.592	231.442	174.686	179.655	103.309	136.409
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	168.265	45.084	232.442	-15.809	179.305	0	138.309	-31.500	172.289

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab.Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2006-2010 juga sebagian besar berasal dari Silpa tahun berkenaan, sebagian lagi berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan netto pada tahun 2006 surplus Rp 168,265 milyar, tahun 2007 sebesar Rp 232,442 milyar, tahun 2008 sebesar Rp 179,305 milyar, tahun 2009 surplus sebesar Rp 138,309 milyar, dan tahun 2010 pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 172,289 milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2006-2010 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam. Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 5 tahun kedepan (tahun 2011-2016) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi pembiayaan sumber pendapatannya sangat terbatas. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011-2016 adalah :

1. Menetapkan belanja tidak langsung maksimal 40 % dan belanja langsung minimal 60 % dari total APBD setiap tahun selama periode 2011 – 2016.
2. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal pada BUMD yang akan didirikan, atau penambahan modal pada Bank Jambi untuk mewujudkan Modal Bank Jambi sebesar Rp 1 trilyun pada tahun 2014.
3. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
4. Medorong pendirian BUMD yang fokus pada pengelolaan hasil kekayaan daerah dengan bersinergi dan bekerjasama dengan pihak swasta dengan sistem pembagian saham sehingga pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional dan independent.
5. Dalam penyertaan modal pada BUMD harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap kelayakan dan kinerja BUMD yang sudah ada di Provinsi maupun yang akan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selain itu, terhadap arah kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas untuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat lokal.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi Belanja tidak langsung pada tahun 2006 sebesar Rp 120,51 milyar, yang terdiri dari belanja pegawai Rp 103,345 milyar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 16,46 milyar. Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 217,106 milyar tahun 2006, pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung selama 2006-2010 sebesar 20,52 persen, belanja langsung sebesar 14,93 persen. Pengeluaran pembiayaan rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen pertahun, pertumbuhan ini didorong oleh silpa tahun berkenaan yang meningkat rata-rata sebesar 0,59 persen pertahun selama periode 2006-2010.

Tabel 3.16
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pembiayaan
Pengeluaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2006-2010 (Rp Juta)

Uraian Belanja	Tahun Anggaran					GR(%)
	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	97.306	117.308	144.463	195.180	235.704	24,75
1. Belanja Pegawai	80.147	95.591	119.427	166.580	197.653	25,32
2. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
3. Belanja Subsidi	0	784	647	791	188	-37,61
4. Belanja Hibah	0	0	989	10.672	19.867	348,18
5. Belanja Bantuan Sosial	0	2.980	7.665	1.014	664	-39,07
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	16.457	16.464	15.735	15.540	17.150	1,04
8. Belanja Tidak Terduga	703	1.490	0	584	182	-28,64
C. BELANJA LANGSUNG	240.205	327.250	420.280	415.752	397.393	13,41
1. Belanja Pegawai	23.334	21.800	23.178	16.720	18.556	-5,57
2. Belanja Barang dan Jasa	53.369	74.218	103.563	108.594	95.882	15,77
3. Belanja Modal	163.503	231.232	293.538	290.439	282.954	14,70
TOTAL BELANJA	337.511	444.558	564.743	610.932	633.096	17,03
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	169.565	233.442	180.305	138.459	174.289	0,69
- SILPA Tahun Berkenaan	168.265	232.442	179.305	138.309	172.289	0,59
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
- Penyertaan Modal/Investasi	1.300	1.000	1.000	150	2.000	11,37
TOTAL (A + B + C)	507.076	678.000	745.048	749.392	807.385	12,33

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2006-2010 (Data diolah)
Ket. GR = Pertumbuhan Rata-rata (%)

Pengeluaran wajib untuk belanja tidak langsung, diprioritaskan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Pengeluaran wajib ini menyerap lebih dari 86 persen belanja tidak langsung tahun 2006-2010, artinya kedepan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus mengalokasikan belanja tidak langsung minimal sebesar kebutuhan pada tahun 2010 dengan asumsi relative kecil penambahan pegawai negeri. Sedangkan pengeluaran wajib untuk belanja langsung sebagian besar diserap oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal, untuk belanja pegawai pada pos pengeluaran belanja

langsung masih dapat ditekan antara lain untuk biaya perjalanan dinas dan biaya akomodasi lainnya.

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung pada periode 2006-2010, trendnya terus meningkat dari 28,83 persen tahun 2006 menjadi 37,23 persen tahun 2010, dimana pengeluaran wajib untuk belanja tidak langsung, sebagian besar untuk belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 25 persen dari belanja total. Sedangkan belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa relatif kecil yaitu rata-rata hanya 4 - 5 persen selama periode 2006-2010. Dengan dasar perhitungan tersebut, maka pertumbuhan belanja tidak langsung untuk periode 2011-2016 diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,49 persen pertahun, dimana belanja pegawai ditargetkan tumbuh sebesar 4,65 persen, dan belanja bantuan keuangan untuk desa tumbuh sebesar 9,19 persen pertahun selama periode 2011-2016.

Untuk belanja langsung diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 9,37 persen, dimana belanja pegawai tumbuh sebesar 6,72 persen, belanja barang dan jasa 6,55 persen dan belanja modal sebesar 6,88 persen. Sebagian besar belanja langsung akan diserap oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa rata-rata sebesar 94 persen, sedangkan belanja pegawai hanya sebesar 6 persen. Untuk menjaga momentum pembangunan agar dapat terus tumbuh dengan baik, maka persentase belanja modal dalam total belanja harus diatas 40 persen selama periode 2011-2016. Disamping itu perlu moratorium dalam pengalokasian belanja, dimana belanja tidak langsung harus ditetapkan maksimal 40 persen dari total belanja dan belanja langsung minimal sebesar 60 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat melaksanakan program prioritas antara lain program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi ikan nelayan (program penyediaan pompong), pengentasan kemiskinan petani tanaman pangan (melalui peningkatan subsidi), program bedah rumah, kredit modal kerja dan pengembangan ternak.

Tabel 3.17.
Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2016 (Rupiah)

Uraian Belanja	Tahun Anggaran						GR (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	300.042.754.590	327.299.363.000	340.497.875.660	350.583.068.953	362.176.090.792	373.813.440.628	4,49
1. Belanja Pegawai	246,273,038,590	280,056,230,000	287,057,635,750	294,234,076,644	301,589,928,560	309,129,676,774	4,65
2. Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Belanja Hibah	18,925,574,000	13,499,891,000	13,634,889,910	13,771,238,809	13,908,951,197	14,048,040,709	- 5,79
5. Belanja Bantuan Sosial	3.795.000.000	2.095.000.000	2.395.000.000	2.395.000.000	2.395.000.000	2.395.000.000	- 2,33
5.1. Santunan Kematian	1,100,000,000	1,900,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	14,8 7
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa	535,900,000	535,000,000	540,350,000	545,753,500	551,211,035	556,723,145	0,77
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa	28,013,242,000	28,013,242,000	32,670,000,000	35,937,000,000	39,531,000,000	43,484,000,000	9.19
8. Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	1,200,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	- 4.36
B. BELANJA LANGSUNG	482,414,422,690	503,637,410,000	541,964,965,830	656,974,295,811	669,707,316,475	755,098,860,371	6.78
1. Belanja Pegawai	29,027,055,000	30,218,244,600	32,517,897,950	39,418,457,749	40,182,438,989	45,305,931,622	6.72
2. Belanja Barang dan Jasa	131,645,772,415	135,982,100,700	146,330,540,774	177,383,059,869	180,820,975,448	203,876,692,300	6.55
3. Belanja Modal	321,741,595,275	337,437,064,700	363,116,527,106	440,172,778,193	448,703,902,038	505,916,236,449	6.88
C. TOTAL BELANJA	782,457,177,280	830,936,773,000	882,462,841,490	1,007,557,364,764	1,031,883,407,267	1,128,912,300,999	5.69

Sumber : Data diolah, Tahun 2011

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur anggaran lima tahun yang akan datang yaitu Tahun 2011-2016.

Pendapatan dalam APBD Tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp. 782.457.177.280 dan tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.128.912.300.999 atau meningkat rata-rata sebesar 5,69 persen per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan meningkat dari Rp 18.063.624.000 tahun 2011 menjadi Rp 44.286.312.206 tahun 2016 atau PAD diperkirakan meningkat rata-rata 19,64 persen pertahun, perkiraan ini lebih tinggi dibanding realisasi pertumbuhan rata-rata PAD tahun 2006-2010 sebesar 16,46 persen pertahun. Dana perimbangan diperkirakan juga meningkat rata-rata sebesar 10,11 persen pertahun yaitu dari Rp 557.617.903.898 tahun 2011 meningkat menjadi Rp 902.472.793.533 tahun 2016.

Sejalan dengan pelaksanaan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pelaksanaan pajak progresif untuk pajak kendaraan bermotor maka transfer pemerintah provinsi dalam bentuk pendapatan bagi hasil pajak diperkirakan akan meningkat cukup signifikan yaitu dari Rp 16.481.238.405 tahun 2011 menjadi Rp 40.082.123.727 tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 19,45 persen pertahun.

Tabel 3.18.
Proyeksi Pendapatan APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran						Growth Rerata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN (Rp)	632,173,995,463	753,684,100,160	831,790,841,490	891,644,364,764	956,683,407,267	1,038,562,300,999	10.44
PENDAPATAN ASLI DAERAH	18,063,624,000	23,444,000,000	29,279,901,983	34,457,756,232	39,424,691,537	44,286,312,206	19.64
Pendapatan Pajak Daerah	1,780,700,000	2,177,000,000	2,621,655,331	3,539,234,696	4,601,005,105	5,613,226,228	25.81
Pendapatan Retribusi Daerah	1,411,290,000	1,937,000,000	3,083,815,117	4,163,150,408	5,328,832,522	6,074,869,075	33.90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	2,589,000,000	6,106,000,000	7,946,359,780	10,330,267,714	12,396,321,256	14,627,659,083	41.39
Lain-lain PAD yang sah	12,282,634,000	13,224,000,000	15,628,071,755	16,425,103,414	17,098,532,654	17,970,557,820	7.91
DANA PERIMBANGAN	557,617,903,898	676,585,703,000	739,634,707,903	786,081,512,929	835,437,572,288	902,472,793,533	10.11
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	267,547,417,898	301,793,000,000	335,858,131,605	358,229,977,926	385,737,253,178	419,340,884,594	9.40
Dana Alokasi Umum	281,719,586,000	356,323,443,000	382,114,308,590	405,041,167,106	425,293,225,460	455,063,751,243	10.07
Dana Alokasi Khusus	8,350,900,000	18,469,260,000	21,662,267,708	22,810,367,897	24,407,093,650	28,068,157,696	27.44
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	56,492,467,565	53,654,397,160	62,876,231,604	71,105,095,604	81,821,143,442	91,803,195,261	10.20
Pendapatan Hibah	14,420,056,000	14,420,056,000	15,277,052,871	16,346,446,572	17,408,965,599	18,279,413,879	4.86
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	16,481,238,405	17,722,000,000	23,995,524,262	28,794,629,114	34,553,554,937	40,082,123,727	19.45
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	25,591,173,160	21,512,341,160	23,603,654,471	25,964,019,918	29,858,622,906	33,441,657,655	5.50
JUMLAH PENDAPATAN	632,173,995,463	753,684,100,160	831,790,841,490	891,644,364,764	956,683,407,267	1,038,562,300,999	10.44

Sumber: Data diolah (2011)

Pada proporsi kerangka pendanaan sumber pendapatan utama diperkirakan masih berasal dari dana perimbangan yaitu dari 88,21 persen tahun 2011 ditargetkan turun menjadi 86,90 persen tahun 2016, agar kemandirian pembiayaan terus meningkat sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Disisi lain proporsi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan yaitu dari 2,86 persen tahun 2011 meningkat menjadi 4,26 persen tahun 2016. Demikian juga proporsi pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi diperkirakan juga terus meningkat yaitu dari 29,17 persen tahun 2011 menjadi 43,66 persen tahun 2016, suatu kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 3.19.
Proyeksi Pendapatan dan Alokasi Sumber Pendapatan APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (%)

URAIAN	Tahun Anggaran						Share Rerata (%)
	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN (Rp)	632,173,995,463	753,684,100,160	831,790,841,490	891,644,364,764	956,683,407,267	1,038,562,300,999	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.86	3.11	3.52	3.86	4.12	4.26	3.62
Pendapatan Pajak Daerah	9.86	9.29	8.95	10.27	11.67	12.67	10.45
Pendapatan Retribusi Daerah	7.81	8.26	10.53	12.08	13.52	13.72	10.99
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	14.33	26.05	27.14	29.98	31.44	33.03	26.99
Lain-lain PAD yang sah	68.00	56.41	53.37	47.67	43.37	40.58	51.57
DANA PERIMBANGAN	88.21	89.77	88.92	88.16	87.33	86.90	88.21
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	47.98	44.61	45.41	45.57	46.17	46.47	46.03
Dana Alokasi Umum	50.52	52.66	51.66	51.53	50.91	50.42	51.28
Dana Alokasi Khusus	1.50	2.73	2.93	2.90	2.92	3.11	2.68
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.94	7.12	7.56	7.97	8.55	8.84	8.16
Pendapatan Hibah	25.53	26.88	24.30	22.99	21.28	19.91	23.48
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	29.17	33.03	38.16	40.50	42.23	43.66	37.79
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	45.30	40.09	37.54	36.51	36.49	36.43	38.73
TOTAL PENDAPATAN (%)	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Data diolah (2011)
Ket: SR = Kontribusi rata-rata (%)

Pada kerangka alokasi pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, pendapatan daerah pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp 632.173.995.463, pendapatan ini akan digunakan untuk gaji pegawai dan guru serta pegawai honor sebesar Rp 246.273.038.590, dan belanja bantuan keuangan pemerintah desa (ADD) sebesar Rp. 28.013.242.000, alokasi ADD akan terus ditingkatkan untuk mencapai rasio ideal yaitu 10 persen dari dana perimbangan. Peningkatan belanja gaji pegawai 2011 lebih besar dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 197,6 Milyar karena meliputi juga Tunjangan Kesejahteraan Daerah. Semua belanja diatas merupakan Belanja Tidak Langsung Periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan visi misi Bupati Tanjung Jabung Timur 2011-2016 untuk mewujudkan Tanjung Jabung Timur yang "Samudra". Pada sisi Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya sebesar 20 persen dari APBD, namun sampai sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur alokasi anggaran pendidikan telah diatas 20 persen. Berkenaan dengan itu progam di sektor pendidikan merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan. Demikian juga untuk bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air minum, listrik dan sanitasi harus cukup signifikan untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi, namun karena keterbatasan anggaran, ditetapkan sekitar 20 – 30 % dari total anggaran. Kedepan akan terus ditingkatkan sejalan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Program prioritas lain yang terkait dengan perwujudan dari visi misi Bupati adalah program perahu motor untuk nelayan sekaligus pengentasan kemiskinan di nelayan yang merupakan program prioritas dari Bupati yang akan dialokasikan pada tahun 2011 sebanyak 100 perahu motor, tahun 2012 sebanyak 550 buah, tahun 2013 sebanyak 550 dan tahun 2014-2015 masing-masing 400 buah pertahun, sehingga total ada sebanyak 2.000 perahu yang akan diserahkan pada nelayan dalam jangka 5 tahun. Alokasi pembagian perahu untuk nelayan tersebut sesuai dengan potensi di beberapa

kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pampak dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatnya pendapatan nelayan.

Selanjutnya juga ada program bedah rumah, masing-masing sebanyak 400 unit setiap tahun sampai tahun 2015, mulai tahun 2011 sehingga seluruhnya akan berjumlah 2.000 unit anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 10 juta per rumah, kemudian juga ada program kredit modal kerja untuk 20 kelurahan dan 73 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk tahap diawal (tahun 2011) dialokasikan sebesar Rp 7,7 milyar dan akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduknya jika alokasi tahun 2011 dapat dimanfaatkan secara baik. Untuk mendorong Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai daerah sentra peternakan, maka dialokasikan anggaran harus cukup signifikan, termasuk untuk mendatang dengan peningkatan SDM di bidang peternakan yang medio tahun 2012 sebanyak 25 orang menyelesaikan pendidikan D-III Kesehatan Hewan UGM.

Disamping program bantuan produktif yang diberikan kepada nelayan dan petani miskin serta UMKM, juga diluncurkan program sosial seperti program santunan kematian sebesar Rp 1 juta untuk setiap penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meninggal. Program ini ditujukan untuk dapat meringankan beban keluarga yang mengalami musibah (kematian), yang merupakan satu bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada warganya. Agar program ini dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kejujuran semua pihak dan tentunya pengawasan dan sistem pelaporan yang baik, cepat dan transparan, sehingga setiap kejadian penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meninggal dapat cepat diketahui dan dapat menerima haknya sebagai warga negara.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama tahun 2011-2016 diperkirakan sebesar 10,44 persen, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung periode wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar 4,49

persen dan pertumbuhan belanja langsung periode wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar -0,87 persen, sehingga secara total belanja diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 9,58 persen pertahun selama periode 2011-2016.

Tabel 3.20.
Kerangka Pendanaan APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran (Rp Jutaan)						Growth Rerata (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6		
1. Pendapatan Daerah	632,173,995,463	753,684,100,160	831,790,841,490	891,644,364,764	956,683,407,267	1,038,562,300,999	10.44
2. Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	172,183,181,816	80,752,672,840	87,172,000,000	82,413,000,000	76,700,000,000	91,850,000,000	-11.81
3. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	70,000,000,000	-	0	
4. Belanja Tdk langsung periode yg wajib dan mengikat serta Prioritas utama	300,042,754,590	327,299,363,000	340,497,875,660	350,583,068,953	362,176,090,792	373,813,440,628	4.49
<i>a. Gaji Pegawai</i>	<i>246,273,038,590</i>	<i>280,056,230,000</i>	<i>287,057,635,750</i>	<i>294,234,076,644</i>	<i>301,589,928,560</i>	<i>309,129,676,774</i>	4.65
<i>b. Belanja Bunga</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>c. Belanja Subsidi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>d. Belanja Hibah</i>	<i>18,925,574,000</i>	<i>13,499,891,000</i>	<i>13,634,889,910</i>	<i>13,771,238,809</i>	<i>13,908,951,197</i>	<i>14,048,040,709</i>	-5.79
<i>e. Belanja Bantuan Sosial</i>	<i>2,695,000,000</i>	<i>2,095,000,000</i>	<i>2,395,000,000</i>	<i>2,395,000,000</i>	<i>2,395,000,000</i>	<i>2,395,000,000</i>	-2.33
<i>e.1. Santunan Kematian (Rp 1 juta/Jiwa) (Rp Jt)</i>	<i>1,100,000,000</i>	<i>1,900,000,000</i>	<i>2,200,000,000</i>	<i>2,200,000,000</i>	<i>2,200,000,000</i>	<i>2,200,000,000</i>	14.87
<i>f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa</i>	<i>535,900,000</i>	<i>535,000,000</i>	<i>540,350,000</i>	<i>545,753,500</i>	<i>551,211,035</i>	<i>556,723,145</i>	0.77
<i>g. Belanja Bantuan Keuanganl Kepada Prov./Kab./kota dan Pemerintahan Desa</i>	<i>28,013,242,000</i>	<i>28,013,242,000</i>	<i>32,670,000,000</i>	<i>35,937,000,000</i>	<i>39,531,000,000</i>	<i>43,484,000,000</i>	9.19
<i>h. Belanja Tidak Terduga</i>	<i>2,500,000,000</i>	<i>1,200,000,000</i>	<i>2,000,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>2,000,000,000</i>	<i>2,000,000,000</i>	-4.36

5. Belanja langsung Periodik yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	335,980,109,000	295,784,648,000	300,260,348,810	298,242,389,786	313,591,089,761	321,577,823,388	-0.87
<i>a. Sektor Pendidikan</i>	<i>43,284,547,000</i>	<i>57,284,547,000</i>	<i>61,294,465,290</i>	<i>65,585,077,860</i>	<i>70,176,033,311</i>	<i>75,088,355,642</i>	<i>11.65</i>
<i>b. Sektor Infrastruktur (20-30%)</i>	<i>247,116,666,000</i>	<i>191,248,891,000</i>	<i>191,073,868,820</i>	<i>190,895,346,196</i>	<i>190,713,253,120</i>	<i>190,527,518,183</i>	<i>-5.07</i>
<i>c. Sektor Kesehatan</i>	<i>22,358,896,000</i>	<i>28,397,210,000</i>	<i>30,385,014,700</i>	<i>32,511,965,729</i>	<i>34,787,803,330</i>	<i>37,222,949,563</i>	<i>10.73</i>
<i>d. Pengentasan Kemiskinan</i>	<i>3,170,000,000</i>	<i>3,329,000,000</i>	<i>3,584,000,000</i>	<i>3,850,000,000</i>	<i>4,144,000,000</i>	<i>4,504,000,000</i>	<i>7.28</i>
<i>e. Bantuan Pompong Nelayan (2000 Buah)</i>	<i>350,000,000</i>	<i>1,925,000,000</i>	<i>1,925,000,000</i>	<i>1,400,000,000</i>	<i>1,400,000,000</i>	<i>1,400,000,000</i>	<i>31.95</i>
<i>f. Bedah Rumah (2000 unit)</i>	<i>4,000,000,000</i>	<i>4,000,000,000</i>	<i>4,000,000,000</i>	<i>4,000,000,000</i>	<i>4,000,000,000</i>	<i>4,000,000,000</i>	<i>0.00</i>
<i>g. Penyediaan Exavator</i>	<i>8,000,000,000</i>	<i>9,600,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>h. Kredit Modal Kerja (20 Kelurahan, 73 Desa)</i>	<i>7,700,000,000</i>	<i>0</i>	<i>7,998,000,000</i>	<i>0</i>	<i>8,370,000,000</i>	<i>8,835,000,000</i>	<i>2.79</i>
6. Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib dan Mengikat	21,900,000,000	3,500,000,000	36,500,000,000	36,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-41.50
<i>a. Pembentukan Dana cadangan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35,000,000,000</i>	<i>35,000,000,000</i>			
<i>b. Penyertaan Modal/Investasi</i>	<i>21,900,000,000</i>	<i>3,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>-41.50</i>
Total Langsung	482,414,422,689	503,637,410,000	541,964,965,830	656,974,295,811	669,707,316,475	755,098,860,371	9.37

Sumber: Data diolah (2011)

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan daerah ditambah pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran yang menjadi total penerimaan kemudian dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dari perhitungan tersebut diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 171,090,787,689 dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 452,520,800,837 atau meningkat rata-rata sebesar 21,47 persen pertahun, kemudian pertumbuhan rata-rata penerimaan sebesar 7,04 persen pertahun, sedangkan total pertumbuhan rata-rata Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 1,37 persen pertahun, sehingga pertumbuhan rata-rata Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar 21,47 persen pertahun untuk periode 2011 - 2016. Pembentukan dana cadangan mulai dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 35 Milyar yang berasal dari selisih Silpa tahun sebelumnya (Tahun 2012 dan 2013), sehingga pada tahun 2014 total dana cadangan berjumlah sebesar Rp. 70 Milyar yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur beberapa jembatan bentang menengah. Dari gambaran kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan masih relative kecil. Berkenaan dengan itu perlu pengawasan yang lebih proaktif dalam menjalankan semua program wajib dan prioritas yang telah dijanjikan pada rakyat.

Tabel 3.21.

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
Tahun 2011-2016 (Rupiah)**

No	Uraian	Proyeksi (Rp)						Growth Rerata (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan	632,173,995,463.00	753,684,100,160.00	831,790,841,489.94	891,644,364,764.28	956,683,407,267.10	1,038,562,300,999.38	10.44
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	70,000,000,000	0	0	
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	172,183,181,816	80,752,672,840	87,172,000,000	82,413,000,000	76,700,000,000	91,850,000,000	-11.81
	Total penerimaan	804,357,177,279	834,436,773,000	918,962,841,490	1,044,057,364,764	1,033,383,407,267	1,130,412,300,999	7.04
	Dikurangi:							
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	633,266,389,590	609,254,120,000	658,687,984,560	667,113,466,429	658,412,018,321	677,891,500,162	1.37
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	171,090,787,689	225,182,653,000	260,274,856,930	376,943,898,335	374,971,388,946	452,520,800,837	21.47

Sumber: Data diolah (2011)

Jika dilihat dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2011 sebesar Rp 171,090,787,689 , tahun 2012 sebesar Rp 225,182,653,000, tahun 2013 sebesar Rp 260,274,856,930, tahun 2014 sebesar 376,943,898,335 dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 374,971,388,946 serta tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 452,520,800,837 atau diprediksi meningkat rata-rata sebesar 21,47 persen. Kapasitas riil tersebut akan diperuntukkan untuk menunjang program wajib dan program prioritas selama tahun 2011-2016 mendatang. Pemilihan program dan kegiatan ini harus benar-benar mampu mendorong program prioritas dan program utama untuk mewujudkan Tanjung Jabung Timur Sejahtera, Adil , Mandiri, Unggul, Demokratis dan Agamis atau Tanjung Jabung Timur SAMUDRA melalui Sembilan Misi dan Sembilan Program Prioritas.

Tabel 3.22.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi						Growth Rerata (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	171,090,787,689	225,182,653,000	260,274,856,930	376,943,898,335	374,971,388,946	452,520,800,837	21.47
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (IIa-IIb-IIc)							
II.a	Belanja Langsung	482,414,422,690	503,637,410,000	541,964,965,830	656,974,295,811	669,707,316,475	755,098,860,371	9.37
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	35,000,000,000	35,000,000,000	-	-	-
	Dikurangi:							
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	335,980,109,000	295,784,648,000	300,260,348,810	298,242,389,786	313,591,089,761	321,577,823,388	-0.87
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	21,900,000,000	3,500,000,000	36,500,000,000	36,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-41.50
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	124,534,313,690	204,352,762,000	240,204,617,020	357,231,906,026	354,616,226,714	432,021,036,983	28.25
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	46,556,473,999	20,829,891,000	20,070,239,910	19,711,992,309	20,355,162,232	20,499,763,855	-15.13
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II							
III.a	Belanja Tidak Langsung	300,042,754,590	327,299,363,000	340,497,875,660	350,583,068,953	362,176,090,792	373,813,440,628	4.49
	Dikurangi:							
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	275,386,280,590	309,969,472,000	321,927,635,750	332,371,076,644	343,320,928,560	354,813,676,774	5.20
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa-IIIb)	24,656,474,000	17,329,891,000	18,570,239,910	18,211,992,309	18,855,162,232	18,999,763,855	-5.08
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	21,899,999,999	3,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-41.50

Sumber: Data diolah (2011)

Berdasarkan data diatas, maka kemampuan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menambah program dan kegiatan diluar dari program wajib dan prioritas relatif sangat kecil. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 54 Tahun 2010, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 34 SKPD (termasuk kecamatan) yang menjalankan program dan kegiatan yang termasuk urusan wajib dan sekitar 9 SKPD lainnya yang menjalankan program dan kegiatan urusan pilihan. Namun dengan kemampuan kapasitas riil sebesar Rp 171,090,787,689 tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi Rp 225,182,653,000 tahun 2012, Rp 260,274,856,930 tahun 2013 dan Rp. 376,943,898,335 tahun 2014 dan kemudian menurun menjadi Rp. 374,971,388,946 pada tahun 2015 namun tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp. 452,520,800,837 yang harus dibagi diluar Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, maka harus dipilih dan dipilah program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian Visi Misi Bupati untuk mewujudkan Tanjung Jabung Timur Sejahtera, Adil , Mandiri, Unggul, Demokratis dan Agamis.

Berkenaan dengan itu, karena sempit dan terbatasnya anggaran yang tersedia berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan, maka penentuan skala prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD harus diseleksi dengan baik berdasarkan instrumen evaluasi perencanaan yang baik. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus dapat memberikan *multiplier effect* yang besar kepada masyarakat, sehingga dapat meningkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur kedepan.